

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Amron, *Manajemen Pemasaran SURETY BONDS*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Busro, Ahmad, *HUKUM PERIKATAN Berdasar Buku III KUH Perdata*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011)
- Hartono, Sri Redjeki, *Hukum Ekonomi Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Harahap M. Yahya, *Segi – Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2004)
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2009
- Widjaya, I.G Rai, *MERANCANG SUATU KONTRAK Contract Drafting/ Teori dan Praktik*, Cetakan keempat, (Jakarta: Kesaintblanc, 2007)
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Simajuntak, Emmy Pangaribuan, *BENTUK JAMINAN (Surety Bond, Fidelity Bond) DAN PERTANGGUNGAN KEJAHATAN (Crime Insurance)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty Offset, 1986).

B. Perundang – undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 Tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi dan *Suretyship*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.7/2003 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 761/KMK.013/1992 tentang Bank-Bank yang dapat menerbitkan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi) dan Lembaga Keuangan Non Bank (Perusahaan Asuransi)

yang dapat menerbitkan Surety Bond.

C. Jurnal/Artikel/Makalah

Amron, Kinerja Bisnis Penjaminan *Surety Bond* di Indonesia”, Jurnal Asuransi dan

Manajemen Resiko, Volume 1 Nomor 1, Februari 2013

”Surety Bond dan Potensi Kepailitan”, Jurnal Proteksi Nomor 137/XXII
Maret – April 2001

SURETYSHIP ON NEGOTIABLE INSTRUMENT (PROMISSORY NOTES)
Paramita Prananingtyas September, 21 , 2007